



KR-Franz Boedisukamanto
Kepala SMP Negeri 1 Yogyakarta Y Niken Sasanti (duduk kedua kiri) bersama Panitia Lustrum XVI dan Penasihat PT BP KR Drs HM Idham Samawi (duduk ketiga kiri) serta jajaran Direksi KR.

HUT KE-80 SMP NEGERI 1 YOGYA Adakan Karnaval Budaya Hingga Wayang Kulit

YOGYA (KR) - Guna menyemarakkan HUT ke-80 atau Lustrum ke-16 SMP Negeri 1 Yogyakarta, pihak sekolah bersama Paguyuban Alumni SMP 1 Yogyakarta (PASTU) mengadakan berbagai kegiatan. Diantaranya penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, sosial service dan lomba cerdas cermat antarsiswa SD. Selain beberapa kegiatan itu juga akan diadakan acara ziarah ke taman makam pahlawan, guru dan mantan kepala sekolah pada 2 September. Fun walk dan Nordic pada 3 September, selain itu juga ada pentas seni siswa dan alumni, bazar kelas, pameran lukisan, donor darah serta wayang kulit pada 9 September.

"Kali ini untuk pertunjukan wayang kulit akan menghadirkan Ki Geter Pramuji Widodo pada 9 September (mulai pukul 20.00 WIB). Selain pertunjukan wayang kulit kami juga mengadakan reuni lintas angkatan di sekolah. Adapun puncaknya akan diadakan upacara dan karnaval budaya dan ramah tamah. Dalam upacara yang diadakan pada 11 September nanti kami akan mengundang alumni sekaligus anggota DPR RI, Drs HM Idham Samawi," kata Kepala SMP Negeri 1 Yogyakarta Dra Y Niken Sasanti MPd didampingi, Arif Suhendarto (guru), Mukin P (guru), E Emma Widyarningsih (guru), Ika Rachmanawati (PASTU 70), Bambang Kuncoro (PASTU 73) dan Bambang H (PASTU 72) saat bersilaturahmi dengan Penasihat PT BP KR, Drs HM Idham Samawi di ruang direksi, Senin (29/8).

Dalam kesempatan itu Drs HM Idham Samawi didampingi oleh Direktur Utama PT BP KR, M Wirmon Samawi SE MIB, Direktur Umum, Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc, Direktur Produksi, Baskoro

Jati Prabowo SSo, Direktur Pemasaran, Fajar Kusumawardhani SE dan Direktur Keuangan Imam Satriadi SH serta Pemimpin Redaksi (Pemred) KR, Drs Octo Lampito MPd.

Niken mengatakan, dalam HUT ke-80 SMP Negeri 1 Yogyakarta kali ini mengangkat tema 'Merdeka Meraih Prestasi, Bergerak Membangun Karakter Setia Melestarikan Budaya'. Tema tersebut sengaja dipilih karena selain prestasi akademik, sekolah berharap bisa meningkatkan kecintaan siswa terhadap budaya sekaligus ajang bagi pembentukan karakter. Sehingga lulusan yang dihasilkan tidak sekadar pandai secara akademik, tapi juga berkarakter dan bisa eksis dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di masyarakat.

"Selain prestasi, kecintaan budaya dan pembentukan karakter juga menjadi prioritas kami. Lewat kegiatan ini kami ingin menyatukan kembali alumni yang tersebar diberbagai daerah agar bisa kembali ke sekolah. Karena dukungan dari alumni selama ini sangat besar bagi kemajuan sekolah,"terangnya.

Dalam kesempatan itu Idham Samawi menyatakan, alumni siap mendukung penuh berbagai kegiatan yang diadakan SMPN 1 Yogya untuk kemajuan sekolah dan dunia pendidikan pada umum. Kegiatan tersebut tidak hanya yang berkaitan dengan akademik, tapi juga pelestarian budaya dan pembentukan karakter anak. Tentunya keberadaan guru memiliki peranan penting untuk mewujudkan semua itu. "Saya berharap HUT ke-80 SMPN 1 Yogya selain menjadi ajang silaturahmi bagi para alumni juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas,"ujarnya. **(Ria)-d**

RKUHP Tak Singgung Tindak Pidana Pers

JAKARTA (KR) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) menegaskan, di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers. Dewan Pers telah memberikan solusi yang dinilai bisa diakomodasi.

"Jadi tidak ada itu," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Edward Omar Sharif Hieriej di Jakarta, Senin (29/8).

Edward Omar mengatakan, sebetulnya yang dikhawatirkan Dewan Pers adalah mengenai potensi yang mengarah pada pengkangan kebebasan pers.

Wamenkumham mengatakan, berdasarkan pertemuan sebelumnya dengan Dewan Pers, ia menjelaskan, alasan solusi yang diberikan Dewan Pers bisa diterima karena tidak mengubah konstruksi pasal. Tetapi hanya ditambahkan di dalam rumusan pasal ada suatu klausul "kecuali untuk kepentingan jurnalistik".

Hal tersebut disampaikan berdasarkan pandangan pribadi. Alasannya, hingga kini Wamenkumham belum berbicara secara keseluruhan dengan tim ahli. Namun, diyakini DPR sepakat dengan usulan Dewan Pers guna mencegah adanya pasal pembungkaman pers.

Frasa "kecuali untuk kepentingan jurnalistik" tersebut tidak hanya dimasukkan dalam Pasal 218 tentang Penghinaan Presiden, tetapi juga di banyak pasal lainnya, misalnya pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap ideologi negara Pancasila, termasuk pasal-pasal soal penghinaan terhadap pemerintah, pejabat publik, penghinaan yang menyerang harkat dan martabat Presiden maupun Wakil Presiden.

Semua pasal yang mengatur hal itu, katanya, akan dimasukkan frasa "kecuali untuk kepentingan jurnalistik". "Karena itu tidak mengubah substansi, tidak ada masalah menurut kami," tegas Wamenkumham. **(Ant)-d**

Kerangka Manusia Ditemukan di Kebun

MAGELANG (KR) - Kerangka manusia ditemukan di area semak-semak kebun di Dusun Ngadiwinatan 2, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Senin (29/8).

Kapolres Magelang AKBP M Sajarod Zakun SH SIK melalui Kapolsek Borobudur AKP Marsodik SH membenarkan adanya temuan kerangka manusia tersebut. Dikatakan, mayat ditemukan sudah berupa kerangka atau tinggal tulang-belulang.

Senin sore, lanjut Kapolsek Borobudur, petugas Polsek Borobudur memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya penemuan mayat atau kerangka tersebut. Tim Gabungan Poksek Borobudur, Inafis Sat Reskrim Polres Magelang dan unsur lainnya langsung menuju lokasi. Garis polisi juga dipasang di lokasi penemuan.

Informasi penemuan kerangka manusia itu mengundang perhatian publik. Kerangka tersebut ditemukan dalam po-

sisi tergeletak telentang, tanpa pakaian. Informasi yang diperoleh KR di lokasi kejadian menyebutkan, sore itu ada warga yang akan mencari rumput. Warga tersebut menemukan sesuatu berwarna putih-putih. Setelah didekati, ternyata mayat manusia yang sudah menjadi kerangka. Temuan itu kemudian disampaikan kepada warga lainnya, untuk kemudian dilaporkan ke Polsek Borobudur. Pemeriksaan juga dilakukan di lokasi, sebelum kemudian dibawa ke RSUD Muntilan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga pukul 19.30 WIB, proses pemeriksaan masih berlangsung di RSUD Muntilan. Ada informasi yang menyebutkan mayat yang sudah menjadi kerangka tersebut diduga berjenis kelamin laki-laki.

Kapolsek Borobudur berharap kepada masyarakat luas untuk melapor ke Polsek Borobudur manakala ada anggota keluarganya yang pergi meninggalkan rumah dan lama tidak pulang. **(Tha)-d**

REVISI UU SISDIKNAS

Perlu Pelibatan Dunia Pendidikan

JAKARTA (KR) - Pelibatan dunia pendidikan sangat penting dalam revisi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Karena RUU Sisdiknas diharapkan bisa menjadi acuan yang terintegrasi dalam pengaturan pendidikan di Indonesia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari menilai, hal-hal yang menjadi keberatan publik terkait revisi UU Sisdiknas, mulai dari proses penyusunan hingga poin-poin substansi yang ada di dalamnya, harus didengarkan.

"Saya akan menampung kritikan tersebut selanjutnya akan mempelajari dan mendalami usulan RUU ini sekaligus menghimpun masukan dan keberatan dari masyarakat," kata Taufik Basari di Jakarta, Senin (29/8).

Menurutnya, pelibatan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan menjadi sangat penting. Ia menyebutkan, semua pihak harus hati-hati dan cermat dalam menyusun

RUU Sisdiknas, apalagi pendidikan merupakan hal yang sangat fundamental dalam membentuk karakter anak bangsa.

"Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan negara yang secara eksplisit dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945," ujarnya.

Taufik Basari berharap setiap RUU yang diusulkan sebelumnya harus melalui proses pelibatan publik dan pemangku kepentingan secara bermakna. Apalagi, katanya, sektor pendidikan selalu menjadi fokus pemerintah, sehingga anggarannya sangat besar karena persentasenya telah ditentukan konstitusi.

Taufik menjelaskan, RUU usulan pe-

merintah itu mengintegrasikan sekaligus tiga UU, yaitu UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Oleh karena itu, RUU Sisdiknas sebaiknya dikaji bersama masyarakat sebelum diajukan dalam Prolegnas Prioritas 2023," katanya.

Taufik menjelaskan, ketika DPR membahas UU Cipta Kerja dirinya menolak pasal-pasal yang diajukan pemerintah untuk dimasukkan menjadi klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja, karena terdapat semangat komersialisasi pendidikan yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi.

Menurutnya, setelah perdebatan panjang dan proses lobi, akhirnya klaster pendidikan tersebut dicabut dari draf RUU Cipta Kerja. Pihaknya berharap semangat komersialisasi pendidikan tidak lagi dimunculkan dalam draf RUU Sisdiknas. **(Sim/Ati)-d**

SOAL CALEG BEKAS KORUPTOR

Pemilih Berhak Mengetahui

JAKARTA (KR) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), media massa dan platform media sosial untuk memberikan informasi kepada para pemilih mengenai calon legislatif mantan koruptor yang ikut kontestasi Pemilu 2024.

"KPU, Bawaslu, stasiun televisi, media massa dan platform media sosial harus menginformasikan secara rutin kepada pemilih mengenai nama-nama calon (anggota legislatif) yang merupakan mantan koruptor," kata peneliti Perludem Nurul Amalia dalam webinar bertajuk 'Mantan Terpidana Korupsi Boleh Nyaleg?', Senin (29/8) melalui kanal YouTube Perludem di Jakarta.

Selain itu, tambah Nurul, perlu pula disertakan informasi mengenai kasus korupsi yang menjerat calon legislatif bersangkutan. Rekomendasi yang disampaikan Nurul ini berkaitan dengan

tanggapan Perludem atas mencuatnya narasi bekas narapidana tindak pidana korupsi yang diperbolehkan maju menjadi calon legislatif pada Pemilu 2024.

Narasi itu muncul dari pembahasan mengenai ketentuan yang dimuat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal itu disebutkan, persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Menurut Amalia, memilih anggota legislatif yang merupakan mantan koruptor atau narapidana tindak pidana korupsi berpotensi menghambat per-

wujudan salah satu tujuan pemilu, yakni menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain memberikan informasi kepada publik mengenai caleg yang merupakan mantan koruptor, Perludem juga merekomendasikan kepada KPU untuk memasang nama dan foto caleg mantan koruptor di setiap tempat pemungutan suara (TPS) beserta informasi bentuk korupsi yang dilakukan pihak bersangkutan. Dengan langkah ini, pemilih dapat menghindari memilih calon anggota legislatif yang pernah melakukan tindak pidana korupsi.

Berikutnya, Perludem merekomendasikan kepada KPU agar menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang mengatur adanya masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana kasus korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. **(Ant)-d**

BORONG 11 PENGHARGAAN NUSANTARA CSR AWARD

Pertamina Sukses Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat Jateng-DIY



KR-Istimewa

11 program CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah dianugerahi Nusantara CSR Award

SEMARANG (KR) - Pertamina berkomitmen meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, di antaranya ekonomi, lingkungan, kesehatan dan sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan. Berkat keberhasilannya dalam menjalankan komitmen tersebut, Pertamina khususnya melalui salah satu subholding Commercial & Trading yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan DIY, yaitu PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memperoleh 11 penghargaan pada ajang Nusantara CSR Award yang diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, pada Jumat malam (26/8) di Jakarta.

Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi mengatakan seiring berkembangnya zaman tentu permasalahan di masyarakat terus berubah. Untuk itu, perusahaan-perusahaan di sini tentunya harus terus beradaptasi, dalam menciptakan program-program yang bisa lebih sesuai dengan persoalan yang ada di masyarakat.

"Saya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada para perusahaan yang telah berbuat sangat maksimal, dan selamat kepada Pertamina yang kali ini menjadi The best CSR of The Year," imbuhnya.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan 11 penghargaan tersebut disematkan kepada 11 program CSR yang dijalankan bersama

masyarakat di sekitar unit operasi Pertamina di Jateng dan DIY. Di antaranya unit operasi Integrated Terminal (IT) Semarang, Fuel Terminal (FT) Boyolali, FT Rewulu, FT Maos, dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Achmad Yani.

Adapun 11 program tersebut masuk ke dalam beberapa kategori penghargaan di antaranya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat secara merata dari berbagai aspek seperti kesehatan, lingkungan, ekonomi, pendidikan, khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi operasi kami dan juga kelompok masyarakat rentan, seperti difabel dan masyarakat prasejahtera," tutur Brasto.

Di antara 11 program yang menerima penghargaan tersebut, menurutnya, merupakan program-program CSR unggulan yang telah dijalankan secara berkelanjutan dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun terakhir dan telah mendapat pengakuan dan prestasi dari sejumlah ajang dan tokoh nasional.

Seperti beberapa program yang telah memperoleh PROPER Emas, di antaranya program Mernek Jenek yang dijalankan di sekitar FT Maos, program Pemberdayaan Kelompok Usaha Batik Sekar Jatimas yang dijalankan di sekitar FT Rewulu, program Pertamina Sahabat Nelayan yang dijalankan di sekitar lokasi IT Semarang dan program Kresna Patra sebagai bentuk program Sahabat Difabel Pertamina yang dijalankan di sekitar lokasi FT Boyolali yang bahkan telah dikunjungi Staf Khusus Kepresidenan, Angie Yudistia.

"Tidak hanya itu, program lainnya seperti Inovasi Kampung Kuliner Berbasis Energi Baru Terbarukan yang dijalankan di sekitar lokasi DPPU Ahmad Yani juga merupakan salah satu program unggulan dari Desa Energi Berdikari," ungkapnya.

Brasto menyatakan penghargaan yang diterima dari Pertamina tersebut bukan semata-mata disematkan untuk Pertamina saja, tapi juga kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan program yang berjalan.

"Penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh masyarakat yang kami bina dalam program CSR yang kami jalankan yang telah menunjukkan komitmen dan keseriusannya untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik," pungkasnya. **(Ira)**



La Tofi menyerahkan penghargaan Nusantara CSR Award kepada tim Fuel Terminal Boyolali dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah